

**KEBIJAKAN DAKWAH DEWAN PENGURUS WILAYAH
PERSATUAN ISLAM TIONGHOA INDONESIA (PITI)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP
KOMUNITAS MUSLIM TIONGHOA**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
untuk Memenuhi Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Sarjana Sosial Islam**

Disusun Oleh :

ACHMAD MUSOLIKIN

03240012

Dosen Pembimbing:

**I. Drs. M. Rosyid Ridla, M. Si
NIP. 19670104 199303 1 003**

**II. Siti Julaiha, S. Ag, M. Pd
NIP. 19771009 200501 2 003**

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2010

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Musolikin
NIM : 03240012
Jurusan : *Manajemen Dakwah*
Fakultas : Dakwah

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi saya ini tidak terdapat karya yang diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan skripsi saya ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri bukan plagiasi dari hasil karya orang lain.

Yogyakarta, 24 Agustus 2010

g menyatakan

Achmad Musolikin

METERAI
TEMPEL
6000
55E8EAAF257140948
BANKAL POKOK BAYAR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Merdeka Arifianiglo, Telp. (0274) 515585 - 532808 Fax. (0274) 532338 YOGYAKARTA 55281

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/00/1/P.00.5/1283/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

**KEBIJAKAN DAKWAH DEWAN PENGURUS DAERAH
PERSATUAN ISLAM TIONGHOA (PITI) YOGYAKARTA
TERHADAP KOMUNITAS ISLAM TIONGHOA**


Yang dipersepsikan dan disusun oleh :

Nama : Achmad Muzaffar
NIM : 05240012
Telah dimuncakpaskan pada : Kamis, 19 Agustus 2010
Nilai Munakaqsyah : **B+** (delapan puluh empat)

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :


Pembimbing I


Drs. M. Rasyid Ridha, M.Si.
NIP. 19670104 199303 1 003


Pembimbing II


Sri Juliano, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19771009 200501 2 003

Penguji I


Drs. H. Zainudin, M.Ag.
NIP. 19680-827199903 1001

Penguji II


M. Toriq Nurmadiannyah, S.Ag., M.S.
NIP. 19690227 200312 1 001

Yogyakarta, 24 Agustus 2010
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Dakwah



Prof. Dr. H. H. Bahri Ghazali, MA
NIP. 19560120 198503 1 003

Drs. M. Rosyid Ridlo, M.Si
Siti Julaiha, S.Ag, M.Pd
Dosen Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
NOTA DINAS PEMBIMBING
Hal : Skripsi
Achmad Musolikhin

Kepada Yth:
Bapak Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah mengadakan bimbingan, pengarahan dan koreksi terhadap skripsi saudara :

Nama : Achmad Musolikhin
NIM : 03240012
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : "Kebijakan Dakwah Dewan Pengurus Wilayah
Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Daerah Istimewa
Yogyakarta Terhadap Komunitas Muslim Tionghoa"

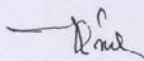
Maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara tersebut di atas telah dapat dimunaqsyahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial di Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian persetujuan ini kami beritahukan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 15 Oktober 2009

Pembimbing I


Drs. M. Rosyid Ridlo, M.Si
NIP. 150260459

Pembimbing II


Siti Julaiha, S.Ag, M.Pd
NIP. 150368338

MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung.”

(QS. Ali Imran: 104)

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا

فَلَا مَرَدَّ لَهُ ۗ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ ۗ.....

.....”Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”...

(QS, Ar-Ra’ad: 11)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas segala karunia Allah SWT. Penulis mempersembahkan karya ini untuk:

- ◆ *Ibu, ibu, ibu dan bapakku, yang dengan sabar dan ikhlas berusaha serta terus menerus mendo'akan anak-anaknya. Terima kasih atas semua dan segala limpahan kasih dan sayangnya.*
- ◆ *Kakak kandung, kakak sepupu, kemenakan dan seluruh keluarga di rumah semoga jejak langkahku ber hikmah buat kalian semua..*

ABSTRAK

Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta berperan untuk membantu komunitas Tionghoa yang ingin masuk Islam, mempelajari Islam dan mengamalkan Islam melalui kegiatan sosial serta untuk meluruskan pemahaman mereka yang keliru tentang Islam. Dalam hal ini, kebijakan dakwah sangat diperlukan agar dapat memanaajemen aspek-aspek persoalan yang berhubungan dengan umat sehingga dakwah Islam dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Kebijakan dakwah bertujuan untuk mengatasi masalah atau urusan yang bersangkutan dengan dakwah itu sendiri. Kebijakan dakwah yang dilakukan Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta salah satu tujuannya adalah ingin meluruskan pandangan dan pemahaman masyarakat Tionghoa yang selama ini keliru menilai Islam.

Dalam penelitian ini mencoba menggambarkan bentuk dan pelaksanaan kebijakan dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap komunitas muslim Tionghoa dan yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap komunitas muslim Tionghoa.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Setelah data didapatkan, kemudian dibaca, dipelajari dan ditelaah dan selanjutnya dilakukan reduksi serta penyusunan data.

Hasil dari penelitian ini adalah bentuk-bentuk kebijakan dakwah meliputi pembinaan berupa bimbingan, pengarahan dan pendampingan kepada muallaf Tionghoa, memberikan pemahaman terhadap masyarakat Tionghoa dan keturunannya tentang ajaran Islam, menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi keagamaan dan lembaga-lembaga lain. Sedangkan jenis-jenis kebijakan dakwah yang telah diterapkan adalah kebijakan dakwah dalam menggunakan metode dan media dakwah, kebijakan dakwah dalam penggunaan materi dakwah, kebijakan dakwah dalam pelaksanaan dan sasaran dakwah. Faktor penghambat meliputi faktor internal dan eksternal sedangkan faktor pendukung meliputi adanya loyalitas pengurus yang memiliki dedikasi tinggi untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengurus.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan hidayah kepada Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang yang dengan Qudrah dan Iradah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Kebijakan Dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Komunitas Muslim Tionghoa**. Salawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan.

Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dalam rangka mewujudkan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan sehingga mengurangi kelancaran kerja, namun atas pertolongan Allah SWT serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan ini dapat penulis atasi. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bahri Ghazali, M. A, selaku Dekan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dra. Siti Fatimah, M. Pd. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan bapak Achmad Muhammad, M. Ag, selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah yang telah memberikan motivasi penulis untuk selalu berkarya.
3. Bapak Drs. M. Rosyid Ridlo, M.Si, dan Ibu Siti Julaiha, S.Ag, M.Pd selaku pembimbing skripsi yang penuh keikhlasan, kesabaran, pengertian dan

persahabatan dalam membimbing penulis, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Keluarga Besar Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu yang telah memberikan segalanya bagi proses perjalanan ananda, sembah sungkemku untuk kalian, tiada henti-hentinya kutasbihkan puja untuk kalian. Ananda sadar tidak bisa membalas cinta dan kebaikan kalian namun paling tidak ananda akan selalu mohon kepada-Nya agar kalian dianugerahi Ridlo dan Maghfiroh-Nya.
7. Belahan hatiku yang tak henti-hentinya memotivasi dan membuatku lebih hidup.
8. Teman-teman mantan pengurus BEM-J MD 2005-2007
9. Teman-teman kost Narada 8 yang selalu menemaniku dalam kesepian
10. Teman-teman komunitas mancing sidhat dan mancing ikan sisik kebersamaan kita tidak akan pernah terlupa.
11. Teman-teman yang pernah aku kenal dimanapun engkau berada, aku akan tetap merindukanmu.
12. Pihak-pihak yang telah membantu penulis baik semasa studi maupun dalam menyelesaikan penelitian ini yang tidak sempat penulis sebutkan, akan tetapi semangat dan bantuannya sangat berguna bagi penulis.

Akhirnya dengan segala kelemahan dan kekuatan yang penulis miliki sudah sewajarnya penulis menerima kritik dan saran yang konstruktif, bagi sempurnanya skripsi ini. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan

baik secara penulisan maupun sumber-sumber yang penulis sampaikan. Semoga kritik dan saran yang disampaikan kepada penulis, menjadi bekal pengetahuan dalam penulisan-penulisan di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 5 Oktober 2009
Penulis

Achmad Musolikhin
03240012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Peneliltian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. KerangkaTeoritik.....	11
G. Metode Penelitian	23
H. Sistematika Pembahasan.....	29
BAB II GAMBARAN UMUM ORGANISASI DEWAN PENGURUS WILAYAH PERSATUAN ISLAM TIONGHOA INDONESIA (DPW PITI) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	
A. Gambaran Umum PITI	31
B. Gambaran Umum PITI DIY	33

C. Gambaran Geografis dan Demografi Kota Yogyakarta.....	35
D. Visi dan Misi Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia	37
E. Dasar Tujuan DPW PITI DIY.....	38
F. Struktur Organisasi Persatuan Islam Tionghoa Indonesia.....	40
G. Program Kerja DPW PITI DIY.....	44
H. Sumber Dana Organisasi DPW PITI DIY	45
I. Keadaan Sarana Prasarana DPW PITI DIY.....	46

**BAB III KEBIJAKAN DAKWAH DEWAN PENGURUS WILAYAH
PERSATUAN ISLAM TIONGHOA INDONESIA (DPW PITI)
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP KOMUNITAS
MUSLIM TIONGHOA**

A. Bentuk Kebijakan Dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia.....	49
1. Kebijakan Dalam Menggunakan Metode dan Media Dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) DIY	49
2. Kebijakan Dalam Penggunaan Materi Dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) DIY.....	52
3. Kebijakan Pelaksanaan dan Sasaran Dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) DIY.....	55
B. Faktor Penghambat dan Pendukung Pelaksanaan Kebijakan Dakwah DPW PITI DIY	57

**BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN DAKWAH DEWAN PENGURUS
WILAYAH PERSATUAN ISLAM TIONGHOA INDONESIA (DPW
PITI) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP
KOMUNITAS MUSLIM TIONGHOA**

A. Kebijakan Pelaksanaan dan Sasaran Dakwah DPW PITI DIY.....	59
B. Kebijakan Penggunaan Metode Dan Media Dakwah	73
C. Faktor Penghambat dan Pendukung.....	79

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Kritik dan saran.....	83
C. Kata Penutup.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Jumlah Orang Tionghoa di Yogyakarta.....	35
Tabel II	: Orang Tionghoa Berdasar Suku di Yogyakarta Tahun 1930.....	36
Tabel III	: Jumlah Penduduk Suku Bangsa Tionghoa Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin	37
Tabel IV	: Struktur Organisasi DPW PITI DIY	41
Tabel V	: Daftar Infentaris Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia DIY	46

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Pedoman interview
- Lampiran II : Bukti Seminar Proposal
- Lampiran III : Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran IV : Surat Keterangan/Izin BAPEDA DIY
- Lampiran V : Surat Keterangan telah melaksanakan penelitian skripsi
- Lampiran VI : Surat Keterangan Praktikum
- Lampiran VII : Foto-foto Aktivitas PITI DIY
- Lampiran VIII : Undangan-undangan PITI DIY
- Lampiran IX : Sertifikat KKN
- Lampiran X : Sertifikat Placement Test
- Lampiran XI : Sertifikat Pelatihan Manajemen dan Operasional BMT
- Lampiran XII : Sertifikat Ketua Panitia Seminar Perhajian di Indonesia
- Lampiran XIII : Sertifikat Orientasi dan Profesi Avhievment Motivation Training
(AMT)
- Lampiran XIV : Sertifikat TOEFL dan TOAFL
- Lampiran XV : Sertifikat Ujian Sertifikasi Teknologi Informasi dan Komunikasi
- Lampiran XVI : Curriculum Vitae

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Politik diskriminatif yang dilancarkan pemerintah Kolonial Belanda yang memasukkan Tionghoa ke dalam golongan timur asing dengan hak lebih menguntungkan, tanpa terasa lelah menciptakan jarak budaya munculnya stereo type “*in group* dan *out group*” yang menyesatkan.

Perlakuan Kolonial Belanda terhadap Tionghoa memiliki dua sisi, di satu sisi komunitas Tionghoa diberi fasilitas yang memudahkan berbisnis dan banyak monopoli tetapi disisi lain komunitas Tionghoa dijadikan kambing hitam, yang diperlakukan sebagai saluran ledakan-ledakan kemarahan rakyat atas penindasan ekonomi, politik oleh Kolonial Belanda. Dalam konteks ini komunitas kulit putih menjadi warga negara kelas satu (*Europeanen*), sedang orang Tionghoa menempati kelas dua yang disebut kaum timur asing (*Veedem Oosterling*) sementara mereka yang disebut pribumi diberi tempat kelas tiga (*Inlander*)¹

Pemerintah Kolonial Belanda juga melakukan politik pecah belah dengan memaksa komunitas Tionghoa dengan penduduk setempat “Pribumi”. Untuk keluar dari pemukiman tersebut komunitas Tionghoa harus dibekali surat ijin tertentu (*passentulsel*) bagi yang melanggar akan diadili oleh politik

¹ Al Qurtubi, *Arus Cina-Islam-Jawa: Bongkar Sejarah Atas Peranan Tionghoa Dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara Abad XV&XVI* (Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya Press, 2003), hlm. 198

Roll sebuah pengadilan tanpa hak membela diri. Mereka juga dilarang memakai pakaian orang pribumi, pakaian orang barat agar mudah dikenali.²

Komunitas Tionghoa masa lalu yang turut ambil bagian dalam sejarah Islamisasi di Jawa dan keikutsertaannya dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia hal ini menjadi fakta sejarah bahwa pada masa lalu telah terjadi percampuran budaya yang lebur menjadi satu. Melihat realita jalannya sejarah yang demikian maka identitas *Sino-Javanese Muslim Culture* perlu dimunculkan kembali sebagai alat integrasi sosial khususnya Jawa-Tionghoa yang selalu memburuk pada masa kini. Jika komunitas Tionghoa terlihat sebagai orang lain di bumi Indonesia ini adalah antara lain kurang adanya pengakuan terhadap peran yang telah mereka mainkan dalam kerangka Islamisasi nusantara (khususnya Jawa) padahal diakui atau tidak Tionghoa mempunyai peranan cukup signifikan dalam proses Islamisasi Jawa. Disamping itu yang tidak bisa ditampik adanya *segregation* Jawa-Tionghoa ini adalah faktor politik yang sejak Kolonial Belanda hingga Orde Baru selalu menjadikan Tionghoa “kambing hitam” dan menyekap mereka yang jauh dari publik ramai “Pribumi”. Komunitas Tionghoa di mata pribumi lebih tepat sebagai pengendali ekonomi “Pribumi” yang sewaktu-waktu dicurigai sebagai kelompok yang kurang mempunyai komitmen sosial, kikir, selalu berorientasi pada keuntungan eksklusif, materealistik serta merasa diri sebagai komunitas yang agung dan bermartabat. Adanya pola pandang yang negatif ini, konflik sosial berlatar belakang komunitas mudah meletus hanya terkadang terpicu

² *Ibid*, hlm. 200

oleh hal yang kecil, celaknya lagi jika tindakan anarkis, brutal mengatasnamakan agama.³

Pada masa Orde Baru komunitas asing, komunitas Tionghoa, India dan Arab, khususnya Tionghoa dalam kegiatan ekonomi diberi akses paling besar dalam sektor ekonomi pada akhirnya membuktikan mampu mempromosikan mereka menjadi penguasa modern di Indonesia meninggalkan kelompok muslim yang tetap pada level *indigenous*, penguasa tradisional. Banyak orang Tionghoa yang enggan berbaur dengan komunitas pribumi (eksklusif), karena bisnis mereka maju dengan pesat berkat pemerintah sehingga mereka merasa untuk berbisnis tidak terlalu mendesak bekerjasama dengan golongan pribumi. Kalau bekerjasama dengan pribumi biasanya mereka melakukan dengan oknum-oknum pemerintah dan komunitas yang dekat penguasa.

Kedaaan demikian membuat hidup orang-orang Tionghoa tertutup sehingga kurang dapat dorongan untuk masuk Islam kecuali mereka hatinya mendapat hidayah dari Allah atau karena menikah dengan pribumi muslim. Adanya perubahan politik yakni runtuhnya Orde Baru dan munculnya era Reformasi. Perubahan politik ini, mendorong terjadinya perubahan sikap komunitas Tionghoa ke arah yang terbuka kepada komunitas pribumi dalam berusaha maka komunitas Tionghoa harus lebih banyak berinteraksi dan bekerjasama dengan golongan pribumi. Interaksi dan kerjasama yang semakin

³ *Ibid*, hlm 203

luas bisa menjadi salah satu dorongan kuat bagi komunitas Tionghoa untuk masuk Islam.⁴

Dengan adanya perubahan politik maka Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) mempunyai peranan penting untuk melakukan dakwah Islamiyah dengan kebijakan-kebijakan dakwahnya yang tepat. Masih sedikitnya komunitas Tionghoa yang masuk Islam seperti dijelaskan para pengamat Tionghoa. Seorang ahli Cina dari Universitas Indonesia, A. Dahana mencatat bahwa penduduk Tionghoa di Indonesia ada 7.200.000 orang dan seorang ahli peneliti masalah Cina dari Universitas Nasional Singapura menduga ada 5.700.000 orang Tionghoa. Dari jumlah itu, seorang tokoh Indonesia Muslim yang sangat terkenal yaitu Drs. H. Yunus Yahya menduga penduduk Tionghoa Muslim hanya sekitar 1 (satu) persen sedangkan seorang pemerhati tentang Tionghoa HM. Ali Karim memperkirakan muslim Tionghoa hanya 2 (dua) persen dari total penduduk Tionghoa di Indonesia. Hal ini menunjukkan masih sedikitnya Tionghoa di Indonesia sehingga dakwah dikalangan mereka sangat perlu dan mendesak.⁵

Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) adalah organisasi dakwah sosial keagamaan yang berskala nasional merupakan tempat singgah, tempat silaturahmi dan tempat untuk belajar ilmu agama bagi komunitas Tionghoa yang tertarik dan ingin memeluk agama Islam serta tempat bagi mereka yang telah beragama Islam. Berdasarkan hal ini maka Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) sangat diperlukan oleh komunitas Tionghoa baik muslim

109 ⁴ Suderman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 108-

⁵ <http://www.muhammadiyah-tabligh.or.id> 05 September 2003

maupun non muslim. Bagi muslim Tionghoa, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia merupakan wadah silaturahmi, untuk saling memperkuat semangat dalam menjalankan agama Islam di lingkungan keluarganya yang masih non muslim. Bagi komunitas Tionghoa, non muslim Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dapat dijadikan jembatan antara mereka dengan umat Islam. Bagi pemerintah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) sebagai komponen bangsa yang dapat berperan sebagai jembatan penghubung antar suku dan komunitas sebagai perekat untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya untuk mengembangkan proses dakwah Islam masyarakat Tionghoa di wilayah Yogyakarta, Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta berperan untuk membantu komunitas Tionghoa yang ingin masuk Islam, mempelajari Islam dan mengamalkan Islam melalui kegiatan sosial serta untuk meluruskan pemahaman mereka yang keliru tentang Islam. Dalam hal ini, kebijakan dakwah sangat diperlukan agar dapat memajemen aspek-aspek persoalan yang berhubungan dengan umat sehingga dakwah Islam dapat berjalan secara efektif, efisien dan tepat sasaran. Kebijakan dakwah bertujuan untuk mengatasi masalah atau urusan yang bersangkutan dengan dakwah itu sendiri, sebagai contoh banyak penduduk pribumi muslim yang miskin dan kurang terdidik maka timbul persepsi yang salah dikalangan komunitas Tionghoa seolah-olah kalau masuk Islam akan membuat mereka miskin dan bodoh. Persoalan di atas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan komunitas

Tionghoa enggan masuk Islam. Kebijakan dakwah berperan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang relevan dan tepat sehingga dapat menentukan keberhasilan dakwah Islam. Kebijakan dakwah yang dilakukan Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta salah satu tujuannya adalah ingin meluruskan pandangan dan pemahaman masyarakat Tionghoa yang selama ini keliru menilai Islam.

Berdasarkan hal itu, maka perlu dijelaskan bahwa Islam tidak menghendaki penganutnya miskin dan bodoh. Islam malah mengharuskan pemeluknya untuk mencari harta yang sebanyak-banyaknya asalkan caranya halal dan mewajibkan penganutnya untuk menuntut ilmu pengetahuan setinggi-tingginya selama bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya. Pengertian inilah yang disampaikan oleh Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap komunitas Tionghoa di Yogyakarta.

Berangkat dari pemikiran itu, penulis mencoba meneliti suatu bentuk dan pelaksanaan kebijakan dakwah yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta kepemimpinan ke V (periode 2003-2011). Untuk itu, penulis mengambil judul “Kebijakan Dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Komunitas Muslim Tionghoa“

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kebijakan dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap komunitas muslim Tionghoa?
2. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kebijakan dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap komunitas muslim Tionghoa?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dengan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kebijakan dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap komunitas muslim Tionghoa.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan kebijakan dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap komunitas muslim Tionghoa.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Selanjutnya, penulis mengidealkan kegunaan hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai khasanah keilmuan yang terkait dalam pengembangan ilmu dakwah, khususnya yang berkaitan dengan kebijakan dakwah Islam di masa yang akan datang.
- b. Dapat memberikan sumbangan pengetahuan khususnya dalam keilmuan manajemen dakwah dan dapat menambah wawasan serta pengetahuan dalam hal pengambilan kebijakan dakwah.

2. Secara Praktis

- a. Dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi pengelola Persatuan Islam Tionghoa Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan yang berguna bagi pengambilan kebijakan pada sebuah organisasi atau lembaga dakwah Islam.
- c. Meluruskan opini publik yang keliru tentang Islam

E. TINJAUAN PUSTAKA

Untuk menghindari penjiplakan maka penulis mengambil beberapa tulisan atau skripsi yang relevan dengan topik yang penulis bahas dalam skripsi ini, antara lain:

Pertama, “Pelaksanaan dakwah PITI terhadap masyarakat keturunan Kabupaten Kudus“.⁶ Dalam skripsi yang ditulis Makhin tersebut dibahas mengenai pelaksanaan aktifitas PITI terhadap masyarakat keturunan Tionghoa. Bila dilihat dari kemauan masyarakat keturunan Tionghoa untuk masuk Islam cukup bagus karena dilandasi dengan kemauan yang tinggi dan mereka menunjukkan sikap progresif untuk berusaha memahami dan mengamalkan ajaran Islam meski usaha tersebut belum bisa mencapai sempurna. Dalam bidang aqidah mereka masih belum bisa menghilangkan sepenuhnya tentang penggunaan saji-sajian untuk penghormatan nenek moyang. Masih mendatangi dukun atau orang pintar serta masyarakat keturunan Tionghoa masih adanya suatu kepercayaan terhadap tradisi para arwah leluhur.

Kedua, “Dakwah Islam pada masyarakat keturunan Tionghoa (study kasus di kota Semarang)“.⁷ Dalam skripsi yang ditulis Mustaqfirin tersebut dibahas mengenai aktifitas dikalangan masyarakat Tionghoa masih terbatas yang dilakukan oleh penduduk asli. Namun bila dilihat dari segi peningkatan kualitas umat, dakwah dikalangan Tionghoa kota Semarang cukup berhasil

⁶Makhin, *Pelaksanaan Dakwah PITI Terhadap Masyarakat Keturunan Kabupaten Kudus (Skripsi Tidak Diterbitkan)*, (Yogyakarta: Fak. Dakwah, 1995).

⁷Mustaqfirin, *Dakwah Islam Pada Masyarakat Keturunan Tionghoa (study kasus di kota Semarang (Skripsi Tidak Diterbitkan)*, (Yogyakarta: Fak. Dakwah, 1993).

namun belum bisa dikatakan berhasil bila dilihat dari segi kuantitasnya yaitu perkembangan tiap tahunnya sekitar 5%. Dalam skripsi ini dijelaskan program pembauran bagi masyarakat keturunan turut serta dalam perkembangan Islam dikalangan Tionghoa. Dalam skripsi ini dijelaskan secara kultural masyarakat keturunan Tionghoa dibedakan atas Tionghoa dan peranakan Tionghoa (anak cucu Tionghoa) secara pembauran dibedakan. Jika dilihat dari klasifikasi masyarakat Tionghoa maka masyarakat keturunan Tionghoa Daerah Istimewa Yogyakarta adalah warga negara Indonesia peranakan yang telah lama membaur dengan penduduk pribumi.

Ketiga, “Strategi Dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mengembangkan Dakwah Islam di Kota Yogyakarta.”⁸ Dalam skripsi yang ditulis Rubiyanto, proses dakwah meliputi segenap aspek kehidupan akan dapat berjalan efektif dan efisien apabila dalam pelaksanaannya menggunakan strategi dakwah, dalam hal ini sebagai upaya untuk pengembangan dakwah Islam Dewan Perwakilan Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan strategi dakwah dengan langkah perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Tahap perencanaan adalah mempersiapkan terlebih dahulu tenaga-tenaga pelaksana dakwah, alat-alat serta fasilitas yang dibutuhkan bersifat fleksibel. Pada tahap pelaksanaan pesan dakwah disinkronkan dengan permasalahan obyek dakwah sedangkan tahap evaluasi

⁸Rubiyanto , “*Strategi Dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mengembangkan Dakwah Islam di Kota Yogyakarta.*” (*Skripsi Tidak Diterbitkan*), (Yogyakarta: Fak. Dakwah IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

dilakukan sebagai upaya menilai keberhasilan dan kekurangan yang digunakan untuk pijakan strategi dakwah ke depan. Strategi dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta ditunjang dengan menggunakan metode *hikmah, bil-lisan, wajadilhumbil al-lati hiya ahsan* dan *bil-hal*. Selain itu menggunakan metode ceramah, tanya jawab, *role playing*, simulasi, demonstrasi dan praktek nyata digunakan secara khusus dalam mengembangkan dakwah Islam melalui pelatihan kader da'i. Metode tersebut merupakan penggabungan antara metode dakwah tradisional dengan metode dakwah modern yang pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi obyek dakwah.

Berdasarkan skripsi-skripsi tersebut maka penulis akan mengkaji yang belum pernah diteliti sebelumnya yaitu berkaitan dengan kebijakan dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan kegiatan dakwah terhadap komunitas muslim khususnya komunitas Tionghoa.

F. KERANGKA TEORI

1. Tinjauan Kebijakan

Istilah kebijakan dalam pembahasan ini diselaraskan dengan kata bahasa Inggris "*policy*" yang dibedakan dengan kata "*wisdom*" yang berarti kebijaksanaan atau kearifan. Menurut Eulau dan Prewitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang membuatnya maupun yang

menaatinnya (yang terkena kebijakan). Dalam kamus, Webster memberi pengertian kebijakan sebagai prinsip-prinsip atau cara bertindak yang diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu selain itu kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah problem oriented dan berorientasi kepada tindakan action oriented.⁹ Chief J. O. Udoji juga mendefinisikan kebijakan adalah suatu tindakan yang memiliki sanksi mengarahkan pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas dapat diartikan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu.

a. Model Kebijakan

Model kebijakan (*policy model*) sebagai representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang terpilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuan-tujuan tertentu. Model kebijakan tidak hanya digunakan untuk menerangkan, menjelaskan dan memprediksikan elemen-elemen kondisi suatu masalah melainkan juga untuk memperbaikinya dengan merekomendasikan serangkaian tindakan untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Adapun model kebijakan tersebut adalah:

⁹ Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan Sosial* (Bandung: Lembaga Studi Pengembangan, 2003), hlm. 2

¹⁰ <http://www.jai.or.id/jurnal,14Juni2000>

- 1) Model deskriptif

Model deskriptif menjelaskan sebab-sebab dan konsekuensi dari pilihan-pilihan kebijakan, digunakan untuk memantau hasil-hasil dari aksi-aksi kebijakan

- 2) Model normatif

Model normatif selain menjelaskan atau memprediksi juga memberikan dalil dan rekomendasi untuk mengoptimalkan pencapaian nilai guna.¹¹

b. Bentuk-Bentuk Kebijakan

Kebijakan dapat dibedakan dalam beberapa bentuk kebijakan yaitu:

- 1) Berupa aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan masyarakat

Sebagai aturan yang mengatur tata kehidupan masyarakat kebijakan dapat berubah sesuai dengan perubahan masyarakat dan saran-saran yang ingin dicapai pada suatu waktu.

- 2) Distribusi atau alokasi sumberdaya

Kebijakan ini bermula pada tindakan pemerintah untuk membantu golongan ekonomi lemah yang umumnya tidak mendapatkan fasilitas yang disediakan secara umum. Dalam proses perkembangan lebih lanjut kebijakan ini ditujukan untuk

¹¹ JE. Hosio, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*, (Yogyakarta: Laksbang Yogyakarta, 2007), hlm. 16-17

mengimbangi berbagai kesenjangan antar golongan dan daerah dalam suatu negara.

3) Redistribusi atau realokasi

Kebijakan ini merupakan usaha perbaikan kepincangan sebagai akibat dari kesalahan kebijakan sebelumnya.

4) Pembekalan atau pemberdayaan

Pembekalan atau pemberdayaan ini dimaksudkan sebagai model atau melengkapi masyarakat dengan sarana-sarana yang perlu agar dapat berdiri sendiri.

5) Etika

Aturan-aturan moral berdasarkan kaidah yang berlaku baik berupa aturan agama ataupun adat yang dapat dijadikan arahan atau pedoman bagi tindakan instansi yang terkait.¹²

2. Tinjauan dakwah

Dakwah secara bahasa berasal dari kata *da'a yad'u, da'watan* yang mempunyai arti menyeru, memanggil, mendorong, mengajak dan do'a. Dakwah yang semula hanya berarti memanggil atau mengajak kepada sesuatu dalam pengertian khusus berarti mengajak ke jalan Tuhan (Allah).

Pengertian dakwah secara *etimologi* yaitu merupakan suatu proses penyampaian pesan-pesan tertentu yang berupa ajakan atau seruan dengan tujuan agar orang lain memenuhi ajakan tersebut.¹³

¹² *Ibid*, hlm. 69-73

QS. Ali Imron ayat 104 .

الْمُنْكَرِ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ الْحَيْرِ إِلَى يَدْعُونَ أُمَّةٌ مِّنْكُمْ وَلَتَكُنَّ
 الْمُفْلِحُونَ هُمْ وَأَوْلَاتِيكَ

Artinya: Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru pada kebajikan menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Berdasarkan ayat di atas, terdapat beberapa definisi tentang dakwah antara lain:

- a. Dakwah adalah mendorong (memotivasi) umat manusia melakukan kebaikan dan mengikuti petunjuk serta memerintah mereka berbuat makruf dan mencegah perbuatan munkar agar mereka memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁴
- b. Dakwah adalah seruan atau ajakan kepada keinsyafan atau usaha untuk mengubah situasi kepada situasi yang lebih baik dan sempurna baik terhadap pribadi maupun masyarakat. Perwujudan dakwah bukan sekedar usaha peningkatan pemahaman keagamaan dalam tingkah laku dalam hidup saja tetapi juga menuju sasaran yang lebih luas.¹⁵

¹³ Totok Tasmara, *Komunikasi Dakwah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), hlm. 3

¹⁴ Aminudin Sanwar, *Pengantar Studi Ilmu Dakwah*, (Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 1985), hlm.10

¹⁵ Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 1995

a. Fungsi dakwah

Dalam kehidupan masyarakat dakwah berfungsi menata kehidupan yang agamis menuju terwujudnya masyarakat yang harmonis dan bahagia. Ajaran Islam yang disiarkan melalui dakwah dapat menyelamatkan manusia dan masyarakat pada umumnya dari hal yang dapat membawa pada kehancuran.¹⁶

b. Metode Dakwah

Adapun metode dakwah yang dimaksud adalah:

- 1) Dakwah *Fardiah*, merupakan metode dakwah yang dilakukan seseorang kepada orang lain (satu orang atau beberapa orang) dalam jumlah yang kecil dan terbatas. Biasanya dakwah *fardiah* terjadi tanpa persiapan yang matang.
- 2) Dakwah *Ammah*, merupakan jenis dakwah yang dilakukan oleh seseorang dengan media lisan yang ditujukan kepada orang banyak dengan maksud menanamkan pengaruh kepada mereka. Media yang dipakai biasanya berbentuk khutbah atau pidato.
- 3) Dakwah *bil al-hal*, adalah dakwah yang mengedepankan perbuatan nyata, hal ini dimaksudkan agar obyek dakwah mengikuti jejak dan hal ihwal seorang *da'i*.
- 4) Dakwah *bit at-tadwin*, adalah dakwah melalui tulisan baik dengan menerbitkan kitab-kitab, buku, majalah, internet dan lainnya.

¹⁶ Azis Ali, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Pranada Media, 2004) hlm. 37

- 5) Dakwah *bil Hikmah*, yaitu menyampaikan dakwah dengan arif dan bijaksana dengan cara melakukan pendekatan sehingga obyek dakwah mampu melaksanakan dakwah atas kemauannya sendiri.¹⁷

Dengan demikian yang dimaksud dakwah dalam penelitian ini adalah dakwah yang dilakukan melalui penentuan kebijakan dakwah oleh Dewan Pimpinan Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pelaksanaan dakwah yang terhambat oleh berbagai persoalan dan yang muncul silih berganti, menjadikan penyelenggara dakwah tidak mungkin menyelesaikannya secara personal, akan tetapi pelaksanaan dakwah harus dilakukan secara bersama-sama dalam satu barisan yang teratur dan rapi dengan persiapan yang matang serta sistem kerja yang efektif.¹⁸

c. Tujuan Dakwah

Pada dasarnya tujuan dakwah adalah sesuatu yang hendak dicapai melalui tindakan, perbuatan atau usaha.¹⁹ Tujuan dalam proses dakwah merupakan salah satu faktor yang paling penting dan central, karena tujuan proses dakwah merupakan landasan utama yang menjadi dasar bagi

¹⁷ Mustofa Kamal, *Risalah Manajemen Dakwah Kampus "Panduan Pengelolaan Dakwah Kampus"*, (Standarisasi Pelatihan Manajemen Nasional), (Depok: Studi Pustaka, 2004), hlm. 18-19

¹⁸ Mahmudin, *Manajemen Dakwah Rosulullah Suatu Historis Kritis*, (Jakarta: Restu Illahi, 2004), hlm. 7

¹⁹ Awaludin Pimai, *Paradigma Dakwah Humanis "Strategi dan Metode Dakwah Prof. KH. Saifudin Zuhri"*, (Semarang: RaSAIL, 2005), hlm. 35

penempuh sasaran dan strategi atau kebijakan serta langkah-langkah operasional dalam penyelenggaraan dakwah.

Tujuan dakwah dapat dirumuskan ke dalam tiga bentuk yaitu:

1) Tujuan praktis

Tujuan praktis dalam berdakwah merupakan tujuan tahap awal untuk menyelamatkan umat manusia dari lembah kegelapan dan membawanya ke tempat yang terang benderang, dari jalan yang sesat ke jalan yang lurus, dari lembah kemusyrikan dengan segala bentuk kesengsaraan menuju kepada *tauhid* yang menjadikan kebahagiaan.

2) Tujuan realistik

Tujuan realistik adalah tujuan antara terlaksananya ajaran Islam secara keseluruhan dengan cara yang benar dan berdasarkan keimanan sehingga terwujud masyarakat yang menjunjung tinggi kehidupan beragama dan merealisasikan ajaran Islam secara penuh dan menyeluruh.

3) Tujuan Idealis

Tujuan idealis dakwah adalah tujuan akhir pelaksanaan dakwah yaitu terwujudnya masyarakat muslim yang diidamkan dalam suatu tatanan hidup berbangsa dan bernegara, adil, makmur, damai dan sejahtera di bawah limpahan rahmat, karunia dan ampunan Allah SWT.²⁰

²⁰ *ibid*, hlm. 35-38

Agar dapat terwujud tujuan dakwah sesuai klasifikasi masing-masing, tujuan, praktis, tujuan realistis dan tujuan idealis maka dalam penyelenggaraan dakwah harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan mempersiapkan segala hal yang dapat menunjang aktifitas dakwah baik itu secara material maupun immaterial agar target yang direncanakan dapat berhasil.

Dalam proses kegiatan dakwah banyak unsur yang terlibat di dalamnya baik secara langsung mempengaruhi jalannya proses Islamisasi tersebut maupun secara tidak langsung dapat menghambat jalannya proses dakwah kepada individu, kelompok maupun masyarakat. Unsur-unsur pokok yang harus ada dalam pelaksanaan dakwah paling tidak terdapat tiga unsur penentu sehingga proses dakwah itu dapat berlangsung. Ketiga unsur tersebut yaitu *da'i* (subyek dakwah), *mad'u* (obyek dakwah) dan *maadatu adakwah* (materi dakwah). Sedangkan unsur-unsur lain yang dapat mempengaruhi proses dakwah adalah *wasilatud dakwah* (media dakwah), *kifayatud dakwah* atau *thorikatu adakwah* (metode dakwah).²¹

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hukum dakwah ada dua, yaitu:

- 1) Merupakan *fardhu 'ain* bagi kaum muslim untuk melaksanakan dakwah sesuai dengan kemampuan yang ada.
- 2) Dalam hal tertentu dakwah memerlukan keahlian, maka tidak sembarang orang boleh melakukan dakwah sehingga hukumnya

²¹ Aminudin Sanwar, *Op.cit.*, hlm. 40

menjadi *fardhu kifayah* bagi seluruh kaum muslim. Akan tetapi dapat menjadi *fardhu'ain* bagi yang telah memiliki persyaratan tertentu namun yang jelas keseluruhan beban dakwah itu harus ditanggung bersama.

3. Tinjauan Kebijakan Dakwah

Berdasarkan pembahasan di atas, dengan demikian kebijakan dakwah dapat didefinisikan sebagai berikut, kebijakan dakwah adalah suatu ketetapan dakwah yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan dakwah. Adapun kegiatan dakwah merupakan proses awal yang merupakan landasan dasar untuk menuju suatu cita-cita masa depan dakwah yang berangkat dari suatu kondisi obyektif suatu masyarakat melalui proses aktifitas yang panjang (pembuatan kebijakan) menuju masyarakat yang ideal.

Kebijakan umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berfikir. Secara lebih khusus kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan tindakan, karena kebijakan merupakan pedoman untuk pelaksanaan, mengarahkan tindakan untuk mencapai sasaran atau tujuan serta kebijakan juga menjelaskan bagaimana cara untuk mencapai tujuan dengan menentukan petunjuk yang harus diikuti. Kebijakan

dibutuhkan untuk menjamin konsistensi tujuan untuk menghindari keputusan yang berwawasan sempit.²²

Dengan demikian maka diperlukan adanya sebuah pengkajian untuk menghasilkan informasi mengenai,

Pertama masalah kebijakan (*policy problem*) adalah nilai, kebutuhan, atau kesempatan yang belum terpenuhi, yang dapat diidentifikasi untuk kemudian diperbaiki. Pengetahuan mengenai masalah apa yang memerlukan pemecahan membutuhkan informasi mengenai kondisi yang mendahului permasalahan.

Kedua, masa depan kebijakan (*policy future*) adalah konsekuensi dari serangkaian tindakan untuk mencapai nilai-nilai karena merupakan penyelesaian terhadap suatu masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah adalah sangat penting dalam mengidentifikasi masalah kebijakan.

Ketiga, aksi kebijakan (*policy action*) adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan yang dituntut oleh alternatif kebijakan yang dirancang untuk mencapai hasil di masa depan yang bernilai. Untuk merekomendasikan aksi suatu kebijakan, penting untuk mempunyai informasi tentang konsekuensi positif maupun negatif dari tindakan pada berbagai alternatif yang berbeda.

Keempat, hasil kebijakan (*policy outcome*) merupakan konsekuensi yang teramati dari aksi kebijakan. Konsekuensi dari aksi kebijakan tidak

²² John Miner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 1988), hlm. 22

dapat secara penuh dinyatakan atau diketahui ketika tindakan-tindakan sedang berjalan.

Kelima, kinerja kebijakan (*policy performance*) merupakan derajat dari mana hasil kebijakan yang ada, memberi kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai. Dalam realitas, masalah kebijakan jarang terpecahkan, sebagian masalah perlu dipecahkan ulang, dirumuskan kembali atau bahkan tak terpecahkan. Untuk mengetahui apakah suatu masalah dapat diatasi, tidak hanya memerlukan informasi tentang hasil kebijakan tetapi penting sekali apakah kebijakan ini telah memberikan kontribusi terhadap pencapaian nilai-nilai yang telah ditentukan. Informasi mengenai kinerja kebijakan dapat digunakan untuk meramalkan masa depan kebijakan atau menyusun ulang masalah kebijakan. Suatu sistem kebijakan (*policy system*) atau seluruh pola institusional dimana di dalamnya kebijakan dibuat mencakup hubungan timbal balik diantara tiga unsur, yaitu: kebijakan publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan.²³

Adapun kegiatan dakwah merupakan proses awal yang merupakan landasan dasar untuk menuju suatu cita-cita masa depan dakwah yang berangkat dari suatu kondisi obyektif suatu masyarakat melalui proses aktifitas yang panjang (pembuatan kebijakan) menuju masyarakat yang ideal.

²³ William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000), hlm. 109

Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) merupakan organisasi dakwah sosial keagamaan yang tidak mungkin lepas dengan adanya sebuah kebijakan yang diterapkan dalam mengembangkan proses dakwah. Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) dapat berperan untuk membantu komunitas Tionghoa yang ingin masuk Islam, mempelajari Islam dan mengamalkan nilai-nilai Islam melalui kegiatan sosial serta untuk meluruskan pemahaman mereka yang keliru tentang Islam. Sehingga pembinaan kepada *muallaf* Tionghoa dapat dilaksanakan dengan baik dan untuk mendekatkan komunitas ini dalam kegiatan berbangsa dan bernegara.

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang sudah diatur atau berfikir baik-baik untuk mencapai suatu maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya.²⁴

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejenis mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti.²⁵ Penelitian akan diarahkan untuk mendapatkan gambaran secara obyektif tentang obyek yang diteliti.

²⁴ W. J. S. Purwandarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 649

²⁵ Rony Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2005), hlm. 105

Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data yang berhubungan dengan kebijakan dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang menurut Bogdan dan Taylor didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data dekriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.²⁶ Selain itu, penelitian ini termasuk kualitatif karena tidak menggunakan angka sebagai alat pengumpul data.

Adapun di dalam penelitian memerlukan adanya sumber data. Sumber data adalah subyek dari mana data diperoleh.²⁷ Sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Subyek Penelitian

Pemilihan subyek penelitian dilaksanakan dengan *sampling*, yaitu untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari pelbagai macam sumber dan bangunannya, juga untuk menggali informasi yang dijadikan dasar dari rancangan dan teori yang muncul. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini digunakan sampel bertujuan (*purposive sample*).²⁸

Jadi, dalam menentukan informan dalam sampel bertujuan, diperlukan pertimbangan-pertimbangan dalam memperoleh subyek

²⁶ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), hlm. 4.

²⁷ Nana Sudjana, *Op.cit.*, hlm. 16.

²⁸ Lexy Moleong, *Op.cit.*, hlm. 224.

penelitian. Penulis tidak serta merta menentukan sendiri, melainkan diperoleh dari informan kunci (*key informan*), yakni informan yang mengetahui secara persis tentang situasi kondisi latar penelitian karena informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.²⁹

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan kunci adalah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara formal memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap kebijakan dakwah di DPW PITI DIY.

Adapun subyek sebagai sumber data dalam penelitian ini adalah:

- (1) Ketua Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta
- (2) Pengurus Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta
- (3) Anggota Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta

²⁹ *Ibid.* hlm. 132.

b. Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah Kebijakan dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta

c. Dokumen-dokumen, arsip-arsip di Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta yang mendukung sumber data utama.

2. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data tentang penelitian ini, ada beberapa data yang digunakan antara lain:

a. Metode Wawancara atau *Interview*

Metode wawancara (*interview*) adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

Dalam penelitian ini, pewawancara adalah penulis sendiri yang akan mengadakan wawancara dengan Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta guna untuk mendapatkan data primer.

Adapun pedoman wawancara yang penulis terapkan adalah dengan wawancara tidak terstruktur yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar dari hal-hal yang penting untuk

dipertanyakan sehingga wawancara yang diperoleh perlu dirumuskan kembali.³⁰

b. Metode Dokumentasi

Metode Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Yang dimaksud dokumen disini meliputi karangan tulisan, laporan, buku teks, surat kabar, buku-buku harian dan lain-lain.³¹

Metode ini digunakan untuk mengungkapkan dan mencari data yang berkaitan dengan masalah yang penulis bahas.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam model, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data.³²

Teknik ini digunakan untuk mengungkapkan dan menganalisis data yang terkumpul untuk menyusun laporan penelitian. Analisis tersebut dengan menggunakan Analisis Kualitatif Deskriptif. Analisis Deskriptif yaitu menyajikan data dengan cara menggambarkan kenyataan sesuai dengan data yang diperoleh dari hasil penelitian.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 231

³¹ Jabrohim dkk, *Metodologi Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: Hanidita Graha Wijaya, 2003), hlm. 5

³² *Ibid.*, hlm. 280.

Karena itu, tujuan analisis data adalah menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Metode ini untuk menggambarkan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan fenomena atau status Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Analisis data dilakukan sejak awal penelitian dimulai hingga penyusunan hasil akhir penelitian. Konsep analisa yang dipergunakan adalah konsep analisa data mengalir (*flow model analisis*), yakni konsep analisa yang terdiri dari langkah-langkah berikut:

- a. Reduksi data, yaitu merangkum, memilih pokok-pokok penting, dan disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang hasil penelitian. Reduksi data dilakukan dengan mengkaji upaya Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menentukan kebijakan dakwah bagi komunitas Muslim Tionghoa di Yogyakarta dari data “kasar” yang muncul dalam catatan lapangan. Dari bentuk uraian ini, kemudian direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada yang penting, dicari bentuk-bentuk kebijakn dakwah yang secara umum telah dikembangkan.
- b. Display data, yaitu mensistematiskan data secara jelas dalam bentuk yang jelas untuk membantu penulis menganalisa operasionalisasi bentuk-bentuk kebijakan dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji data yang diperoleh, lalu mensistematisir dokumen aktual tentang kebijakan dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta.

- c. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan data dilakukan secara sementara, kemudian diverifikasikan dengan cara mencari data yang lebih mendalam dengan mempelajari kembali hasil data yang telah terkumpul.³³

Mengingat sifat deskriptif dari penelitian ini, maka penulis dalam menyajikan data-data yang ditemukan dengan metode deskriptif analitik, cara berpikir induktif sehingga hasil temuan dapat disajikan secara lebih akurat dan dideskripsikan secara lebih baik.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah dalam pembahasan ini, penulis akan membaginya ke dalam empat bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab lainnya.

Bab I: Merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

³³ Mathew B. Milles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 16.

Bab II: Berisi gambaran umum organisasi, letak geografis dan susunan kepengurusan Dewan Pengurus Daerah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab III: Diuraikan tentang kebijakan dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap komunitas muslim Tionghoa yang meliputi bentuk dan pelaksanaan kebijakan dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta serta faktor penghambat dan pendukungnya .

Bab IV: Analisis Kebijakan Dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (DPW PITI) Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Komunitas Muslim Tionghoa, yang meliputi Kebijakan Pelaksanaan dan Sasaran Dakwah DPW PITI DIY, Kebijakan Penggunaan Metode dan Media Dakwah, Faktor Penghambat dan Pendukung

Bab V: Kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan analisis sebagaimana diuraikan dalam BAB IV, penelitian tentang kebijakan dakwah dapat ditarik beberapa kesimpulan yang sekaligus jawaban atas permasalahan-permasalahan yang telah dikemukakan pada BAB I secara lebih rinci dapat disimpulkan adalah sebagai berikut:

Kebijakan dakwah PITI sudah dilaksanakan dengan baik. Informasi mengenai kebijakan dakwah yang meliputi masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil dan kinerja kebijakan sudah diterapkan ke dalam bentuk-bentuk kebijakan dakwah. Adapun bentuk-bentuk kebijakan dakwah tersebut adalah:

1. Kebijakan Dalam Menggunakan Metode dan Media Dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) DIY.
2. Kebijakan Dalam Penggunaan Materi Dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) DIY .
3. Kebijakan Pelaksanaan dan Sasaran Dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) DIY.

Faktor penghambat dan pendukung dalam merealisasikan kebijakan dakwah DPW PITI Yogyakarta adalah, faktor penghambat meliputi faktor internal dan eksternal sedangkan faktor pendukung meliputi adanya loyalitas pengurus yang

memiliki dedikasi yang tinggi akan tugas dan fungsinya sebagai pengurus serta pengemban amanat, adanya dukungan yang besar oleh masyarakat muslim Tionghoa dan simpatisan PITI.

B. Kritik dan saran

Setelah melakukan penelitian yang panjang, menurut penulis ada beberapa yang menjadi catatan. Baik bagi Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPW PITI) DIY, muslim Tionghoa, masyarakat pada umumnya maupun bagi peneliti selanjutnya. Maka dengan ini penulis memberi kritik dan saran sebagai berikut:

1. Kritik

a. Sekretariat DPW PITI DIY

- 1) Tidak adanya ruangan yang efektif untuk melakukan rapat dan kegiatan organisasi yang berkaitan dengan pengumpulan anggota pengurus dalam jumlah yang besar.
- 2) Pengelolaan administrasi yang kurang maksimal.
- 3) Keadaan prasarana yang kurang memadai (tidak ada white board yang memadai, peralatan tulis menulis yang kurang dan ada beberapa dokumen yang hilang)

b. Pengurus DPW PITI DIY

- 1) Kurangnya pengetahuan dalam hal pengelolaan administrasi.

- 2) Kurangnya pendelegasian tugas atau program kerja dari kepengurusan periode yang lama ke periode yang baru.
- 3) Kurangnya kekompakan pada masing-masing bidang dalam menjalankan roda organisasi.
- 4) Tidak ada pengurus harian yang selalu aktif di sekretariat.

c. Anggota DPW PITI DIY

- 1) Kurangnya kesadaran dari anggota dalam meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program-program dan kegiatan PITI.
- 2) Masih minimnya pengetahuan para anggota tentang Islam.

2. Saran untuk DPW PITI DIY

a. Sekretariat DPW PITI DIY

- 1) Untuk kegiatan rapat yang melibatkan banyak orang hendaknya dilakukan di luar ruangan atau tempat lain yang mendukung terlaksanannya rapat organisasi
- 2) Diadakan pelatihan pengelolaan organisasi (manajemen organisasi) pada setiap periode tertentu.
- 3) Pengadaan prasarana yaitu dengan melengkapi prasarana yang sangat penting sifatnya untuk menjalankan proses organisasi

b. Pengurus DPW PITI DIY

- 1) Perlu diadakan training pengurus dalam setiap waktu tertentu untuk meningkatkan semangat dan kesadaran pengurus dalam menjalankan dan mengembangkan organisasi.
- 2) Diadakan pertemuan setiap waktu tertentu antara pengurus lama dengan pengurus yang baru untuk memusyawarahkan (menginteropeksi) program – program yang sudah terlaksana atau belum terlaksana.
- 3) Diadakan outbond untuk semua pengurus dalam rangka menumbuhkan ikatan emosi masing-masing pengurus.
- 4) Mengadakan pelatihan-pelatihan peningkatan organisasi.
- 5) Menunjuk beberapa pengurus untuk aktif setiap saat (rutin datang ke sekretariat) dengan memberikan balas jasa yang sudah disepakati bersama.

c. Anggota DPW PITI DIY

- 1) Diadakan karyawisata bersama untuk merefleksikan persoalan-persoalan organisasi yang dihadapi bersama.
- 2) Mengadakan acara yang sifatnya mengikat anggota sebagai contoh arisan bulanan.
- 3) Mengaktifkan kegiatan pengajian rutin yang kegiatannya lebih terencana secara teratur seperti pengajian mingguan, pengajian

bulanan, hari-hari besar Islam dengan menyusun materi yang akan disajikan sebagai contoh tadarus al qur'an, tafsir hadis dan al qur'an dan materi-materi lain yang lebih banyak mengandung nilai-nilai keIslaman.

C. Kata Penutup

Rasa syukur tidak terhingga dari lubuk hati yang terdalam, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan serta kesabaran dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW semoga tetap tersanjung kepada Beliau yang telah memberikan suri tauladan bagi umatnya sehingga selamatlah umat yang mengikuti jejak beliau dan tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dari awal hingga selesainya skripsi ini.

Penulis menyadari betapa banyak keterbatasan dan kekurangan serta kelemahan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik konstruktif sangat penulis harapkan dari semua pihak demi sempurnanya penulisan skripsi ini. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis mohon semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua pihak yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Qurtubi, *Arus Cina-Islam-Jawa: Bongkar Sejarah Atas Peranan Tionghoa Dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara Abad XV&XVI* (Yogyakarta: Inspeal Ahimsakarya Press, 2003)
- Aminudin Sanwar, *Pengantar Studi Ilmu Dakwah*, (Semarang: Fakultas Dakwah IAIN Walisongo, 1985)
- Awaludin Pimai, *Paradigma Dakwah Humanis“Strategi dan Metode Dakwah Prof. KH. Saifudin Zuhri“*, (Semarang: RaSAIL, 2005)
- Azis Ali, *Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Pranada Media, 2004)
- BPS Pusat, *Penduduk DIY: Hasil Sensus Pendudduk Tahun 2000*, (Jakarta: BPS Pusat, 2000)
- Dokumen AD ART DPW PITI Daerah Istimewa Yogyakarta
- Dokumen Organisasi DPW PITI DIY 2005
- Dokumen Hasil Mukhtamar Nasional III PITI di Surabaya 2-4 Desember 2005
- Edi Suharto, *Pembangunan Kebijakan Sosial* (Bandung: Lembaga Studi Pengembangan, 2003)
- Fahmi Rafika Perdana, *Integrasi Sosial Muslim-Tionghoa, Studi Atas Partisipasi PITI DIY dalam Gerakan Pembaharuan*, (Yogyakarta: Datamedia, 2008)
- Jabrohim dkk, *Metodologi Penelitian Sastra*, (Yogyakarta: Hanidita Graha Wijaya, 2003)
- JE. Hosio, *Kebijakan Publik dan Desentralisasi*, (Yogyakarta: Laksbang Yogyakarta, 2007)
- John Miner, *Kebijakan dan Strategi Manajemen* (Jakarta: Erlangga, 1988)
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005)
- Mahmudin, *Manajemen Dakwah Rosulullah Suatu Historis Kritis*, (Jakarta: Restu Illahi, 2004)
- Makhin, *Pelaksanaan Dakwah PITI Terhadap Masyarakat Keturunan Kabupaten Kudus (Skripsi Tidak Diterbitkan)*, (Yogyakarta: Fak. Dakwah, 1995).

- Muhammad Sulthon, *Desain Ilmu Dakwah*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2003)
- Munir, M. Illahi, Wahyu, *Manajemen Dakwah*, Prenada Media Media (Jakarta: 2006)
- Mustaqfirin, , *Dakwah Islam Pada Masyarakat Keturunan Tionghoa (study kasus di kota Semarang (Skripsi Tidak Diterbitkan)*, (Yogyakarta: Fak. Dakwah, 1993).
- Mustofa Kamal, *Risalah Manajemen Dakwah Kampus “Panduan Pengelolaan Dakwah Kampus”*, (Standarisasi Pelatihan Manajemen Nasional), (Depok: Studi Pustaka, 2004)
- Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur’an Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1995)
- R. Hardjono, “*Komuniti Tionghoa Yogyakarta: Sejarah Minoritas Lokal Dengan Fokus Sosiologis.*” (Skripsi Tidak Diterbitkan), (Yogyakarta: IKIP Sanata Dharma, 1997)
- Rony Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Jakarta: PPM, 2005)
- Rubiyanto , “*Strategi Dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mengembangkan Dakwah Islam di Kota Yogyakarta.*” (Skripsi Tidak Diterbitkan), (Yogyakarta: Fak. Dakwah IAIN Sunan Kalijaga, 2001)
- Suderman Tebba, *Islam Pasca Orde Baru* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001)
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002)
- Totok Tasmara, *Komunikasi Dakwah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997)
- William Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2000)
- W. J. S. Purwandarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976)

<http://www.muhammadiyah-tabligh.or.id> 05 September 2003

<http://www.jai.or.id/jurnal>, 14 Juni 2000

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Pedoman Pengumpulan Data Kebijakan Dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Komunitas Muslim Tionghoa

A. PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Identifikasi denah.
2. Identifikasi sarana dan prasarana.
3. Identifikasi struktur organisasi .
4. Identifikasi keadaan pengurus dan anggota.
5. Identifikasi buku sejarah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia
6. Identifikasi program kegiatan Persatuan Islam Tionghoa Indonesia

B. PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang melatarbelakangi berdirinya DPW Persatuan Islam Tionghoa Indonesia DIY?
2. Bagaimana sejarah singkat DPW Persatuan Islam Tionghoa Indonesia DIY?
3. Apa visi dan misi DPW Persatuan Islam Tionghoa Indonesia DIY?
4. Bagaimana struktur organisasi DPW Persatuan Islam Tionghoa Indonesia DIY?
5. Bagaimana keadaan sarana dan prasarana di DPW Persatuan Islam

Tionghoa Indonesia DIY?

6. Bagaimana letak geografis DPW Persatuan Islam Tionghoa Indonesia DIY?
7. Apa yang menjadi problematika dakwah bagi anggota dan pengurus DPW Persatuan Islam Tionghoa Indonesia DIY?
8. Apa yang menjadi masalah kebijakan dakwah DPW Persatuan Islam Tionghoa Indonesia DIY?
9. Bagaimana cara menyelesaikan masalah kebijakan dakwah di DPW Persatuan Islam Tionghoa Indonesia DIY?
10. Bagaimana bentuk kebijakan dakwah yang dilaksanakan di DPW Persatuan Islam Tionghoa Indonesia DIY?
11. Bagaimanakah proses pembuatan kebijakan dakwah DPW Persatuan Islam Tionghoa Indonesia DIY?
12. Bagaimana kebijakan dakwah dalam hal menggunakan metode dakwah?
13. Bagaimana kebijakan dakwah dalam menggunakan media dakwah DPW Persatuan Islam Tionghoa Indonesia DIY?
14. Bagaimana kebijakan dakwah dalam materi dakwah?
15. Bagaimana pelaksanaan dan sasaran kebijakan dakwah DPW Persatuan Islam Tionghoa Indonesia DIY?
16. Bagaimana bentuk-bentuk bimbingan dan pendampingan yang

dilakukan oleh Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) DIY terhadap anggotanya?

17. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan kebijakan dakwah?
18. Bagaimana tanggapan pengurus tentang kebijakan dakwah yang telah dilaksanakan DPW Persatuan Islam Tionghoa Indonesia DIY?
19. Bagaimana tanggapan anggota tentang kebijakan dakwah yang telah dilaksanakan DPW Persatuan Islam Tionghoa Indonesia DIY?
20. Apa bentuk dukungan anda dalam kemajuan DPW Persatuan Islam Tionghoa Indonesia DIY?
21. Bagaimana tanggapan masyarakat muslim Yogyakarta terhadap kebijakan dakwah DPW Persatuan Islam Tionghoa Indonesia DIY?
22. Bagaimanakah harapan dari DPW Persatuan Islam Tionghoa Indonesia DIY untuk kebijakan dakwah yang akan datang ?

DATA INFORMAN

1. Nama : Bapak Ma'ruf Siregar
Alamat : Cokrokusuman Baru CT 2/980 A Yogyakarta
Usia : 62 tahun
Pekerjaan : Pensiunan guru agama (ustadz PITI)
Keterangan: Suami dari Ibu Sia Tien Hwa
2. Nama : Ibu Sia Tien Hua
Alamat : Cokrokusuman Baru CT 2/980 A Yogyakarta
Usia : 58 tahun
Pekerjaan : Pedagang bahan kelontong
3. Nama : Bapak Bambang Abidin
Alamat : Demangan GK I/583 Kodya Yogyakarta
Usia : 53 tahun
Pekerjaan : Dagang pakaian
4. Nama : Ibu Iswarni (Siek It Swan)
Alamat : Caturtunggal Sleman
Usia : 46 tahun
Pekerjaan : Pemilik Toko Bahan Bangunan

CATATAN LAPANGAN I

Metode : Wawancara
Hari/Tanggal : 28 Maret 2009
Waktu : 09.15-10.00 WIB
Lokasi : Rumah Bp. Ma'ruf Siregar
Sumber Data : Bp. Ma'ruf Siregar

Deskripsi Data:

Informan adalah salah satu ustadz PITI DIY, pekerja pensiunan guru Pendidikan Agama Islam. Informan juga merupakan pengurus DPW PITI DIY. Saat ditemui informan sedang menjaga toko di rumahnya.

Dari hasil wawancara terungkap, bahwasannya bentuk kebijakan dakwah PITI erat kaitannya dengan pembinaan berupa pendampingan dan bimbingan terhadap muallaf Tionghoa, memberikan pemahaman terhadap masyarakat Tionghoa dan keturunannya tentang Islam, menjalin hubungan dengan organisasi-organisasi keagamaan, lembaga-lembaga dan agama lain, melakukan diskusi. Metode dakwah yang diterapkan PITI adalah metode *hikmah, bi lisan, diskusi, bil hal*. Media dakwah yang digunakan adalah menggunakan media massa, lingkungan keluarga dan tatap muka. Adapun bentuk bimbingan dan pendampingan adalah pengajian anggota, pendekatan individu dan *home visit*.

Interpretasi

- Bentuk kebijakan dakwah PITI erat kaitannya dengan pembinaan berupa pendampingan dan bimbingan terhadap muallaf Tionghoa.
- Metode dakwah yang diterapkan PITI adalah metode *hikmah, bi lisan, diskusi, bil hal*.

- Media dakwah yang digunakan adalah menggunakan media massa, lingkungan keluarga dan tatap muka.



CATATAN LAPANGAN II

Metode : Wawancara
Hari/Tanggal : 31 Maret 2009
Waktu : 09.15-10.00 WIB
Lokasi : Rumah Bp. Ma'ruf Siregar
Sumber Data : Ibu Siatien Hua, Istri Bp. Ma'ruf Siregar

Deskripsi Data

Informan adalah salah satu sekretaris PITI DIY, pekerjaan pedagang kelontong. Saat ditemui informan sedang menjaga toko di rumahnya.

Metode dan media adalah bagian yang tak terpisahkan dalam proses dakwah, keberadaannya merupakan salah satu unsur dakwah sehingga sangat penting keberadaannya. Metode dakwah DPW PITI DIY secara sederhana dapat dipahami bahwa metode dakwah merupakan cara yang dipakai dalam metode dakwah sehingga subyek dakwah dapat mengurai, memahami dan meyakini terhadap metode dakwah yang disampaikan. Metode yang cocok untuk anggota PITI yang baru saja masuk Islam adalah menggunakan metode hikmah dan memberikan contoh-contoh yang baik.

Interpretasi

- Metode dakwah PITI salah satunya adalah metode hikmah yaitu metode dengan ucapan yang jelas diiringi dengan dalil serta contoh-contoh yang baik

CATATAN LAPANGAN III

Metode : Wawancara
Hari/Tanggal : 25 Maret 2009
Waktu : 13.00-14.00 WIB
Lokasi : Rumah Bp. Bambang Abidin
Sumber Data : Bp. Bambang Abidin

Deskripsi Data

Informan adalah salah satu bendahara PITI DIY, pekerjaan pedagang pakaian. Saat ditemui informan sedang berada di rumahnya, penulis disambut dengan ramah dan antusias.

Materi dakwah merupakan sumber yang digunakan atau disampaikan pada anggota PITI. Maka semua kegiatan yang akan disampaikan dalam kegiatan dakwah adalah semua ajaran yang dibawa oleh Rosulullah SAW dari Allah SWT untuk manusia. Pada dasarnya materi dakwah DPW PITI DIY secara umum tidak jauh berbeda dengan materi dakwah yang disampaikan oleh para ahli dakwah diantaranya meliputi aqidah, akhlaq dan syariah. Pelaksanaan dan sasaran dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) DIY lebih ditujukan kepada para muallaf atau muslim Tionghoa dibanding terhadap muslim pribumi. Hal ini dilakukan karena para muallaf atau muslim Tionghoa sangat memerlukan pembinaan yang berupa bimbingan dan pendampingan untuk mengetahui tentang agama Islam yang baru saja mereka anut dan juga untuk melaksanakan ajaran Islam secara benar.

Interpretasi

- Materi dakwah yang disampaikan oleh para ahli dakwah (DPW PITI DIY) diantaranya meliputi aqidah, akhlaq dan syariah
- Pelaksanaan dan sasaran dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) DIY lebih ditujukan kepada para muallaf atau muslim Tionghoa dibanding terhadap muslim pribumi.

CURRICULUM VITAE

Nama : Achmad Musolikhin
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 22 September 1982
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jetis RT 42 RW 21 Gerbosari Samigaluh Kulon Progo
No. Telp. : 085743579397

Nama Orang Tua

Ayah : Marto Wiyono
Ibu : Painem
Pekerjaan : Tani

Riwayat Pendidikan:

1. TK Pertiwi Gerbosari Samigaluh Kulon Progo, lulus tahun 1988
2. SD Negeri Gerbosari Samigaluh Kulon Progo, lulus tahun 1996
3. SMP Negeri 1 Samigaluh Kulon Proga, lulus tahun 1999
4. SMK Kuncup Samigaluh, lulus tahun 2002
5. Masuk Fakultas Dakwah Universitas Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2003

Pengalaman Organisasi:

1. Ketua Remaja Masjid Jami' Jetis tahun 1999-2001
2. Ketua Umum Pengajian Minggu Pagi Samigaluh cabang Krapyak Yogyakarta 1999-2000
3. Ketua Seminar Perhajian di Indonesia tahun 2006
4. Ketua divisi pengembangan organisasi dan sumber daya mahasiswa BEM-J MD tahun 2005-2007
5. Anggota PPM (Paguyuban Pemancing Mataram)



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kepatihan – Danurejan, Yogyakarta – 55213

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor : 070/ 2048

Membaca Surat : Dekan Fakultas Dakwah - UIN SUKA, Nomor : UIN/2/PD.I/TL.01/521/2009
Yogyakarta

Tanggal Surat : 17 April 2009 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Di linkan kepada :

N a m a : Achmad Musolikhin NIM : 03240012
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Judul Penelitian : KEBIJAKAN DAKWAH DEWAN PENGURUS WILAYAH PERSATUAN ISLAM TIONGHOA INDONESIA DIY TERHADAP KOMUNITAS MUSLIM TIONGHOA

L o k a s i : Profinsi DIY
Waktu : Mulai Tanggal 23 April s/d 23 Juli 2009

Ketentuan:

- 1 Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang *berwenang* mengeluarkan ijin;
- 2 Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk (CD)*, dan menunjukkan cetakan asli;
- 3 Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
- 4 Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan *mengajukan surat ijin ini kembali*;
- 5 Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 April 2009

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perencanaan dan Pembangunan
UB
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan)
2. Pimpinan DPW Persatuan Islam Tionghoa Indonesia DIY
3. Kanwil Depag Provinsi DIY
4. Yang bersangkutan

J. SURAT DJUMADAL
NIP. 19560403 198209 1 001



PEMBINA IMAN TAUHID ISLAM
d/h PERSATUAN ISLAM TIONGHOA INDONESIA
اتحاد الجالية الصينية المسلمة الإندونيسية
印尼中華伊斯蘭教聯合會
INDONESIAN CHINESE MOSLEM ASSOCIATION
KOORDINATOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Sekretariat : Jl. Kyai Mojo No. 14 Yogyakarta Telp. (0274) 649 802 Fax. (0274) 614

Yogyakarta, 6 Oktober 2009

No :
Lampiran :
Hal : Penelitian Skripsi

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
ditempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Bersama ini kami beritahukan bahwa Mahasiswa di bawah ini:

Nama : Achmad Musolikhin
NIM/Jurusan : 03240012/Manajemen Dakwah
Alamat : Jl. Gejayan Gg. Narada No. 8 Mrican Yogyakarta

Telah mengadakan penelitian skripsi di Sekretariat DPW PITI Yogyakarta dengan judul Kebijakan Dakwah Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Yogyakarta Terhadap Komunitas Muslim Tionghoa. Mulai tanggal 23 April s/d 23 Juli 2009.

Demikian harap yang berkepentingan menjadi periksa dan maklum adanya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mengetahui
Dewan DPW PITI DIY
Ketua

Hj. Raehana Fatimah